

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan kondisi persaingan perekonomian yang ketat dimana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan dan menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing. Hal ini membuat perusahaan dalam meningkatkan persaingan dalam perusahaan membuat perusahaan akan terus meningkatkan kinerja keuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur *financial health* (kesehatan perusahaan) perusahaan. Banyaknya skandal keuangan yang terjadi dalam perusahaan membuat kinerja keuangan menjadi lemah. Saat kinerja keuangan memburuk para investor atau para stakeholder akan menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan di masa lalu, menilai posisi keuangan di masa sekarang dan melihat potensi serta resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kinerja keuangan yang baik di mata para investor menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan sektor *property* dan *real estate* (Pardede, 2017).

Dengan meningkatnya penanaman modal saham yang diberikan oleh investor untuk perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun juga dapat mempercepat tingkat pertumbuhan sektor *property* dan *real estate* sehingga perusahaan dapat bersaing lebih kompetitif. Semakin kompleks aktivitas perusahaan maka juga akan semakin meningkatnya kebutuhan akan praktik

tata kelola perusahaan yang baik, maka sistem *corporate governance* akan memberikan perlindungan yang sangat efektif kepada para pemegang saham dan kreditor, sehingga dapat menanamkan kepercayaan kepada pihak-pihak tersebut atas investasinya terhadap perusahaan tersebut (Arifanda, 2019).

Good corporate governance (GCG) menjadi isu penting pada saat terjadinya kasus manipulasi dan kebangkrutan besar-besaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar di *Amerika Serikat* (AS). Permasalahan *good corporate governance* di Indonesia juga mulai melambung sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara Asia termasuk juga Indonesia. Contoh kasus yang menjadi bukti bahwa penerapan *good corporate governance* di Indonesia masih lemah adalah kasus pembangunan dan pemasaran kawasan pemukiman raksasa meikarta di kawasan lippo cikarang pada tahun 2018. Dalam hal ini PT Lippo Cikarang Tbk melanggar prinsip dari *good corporate governance* seperti kurangnya transparan kepada konsumen dan kurangnya tanggung jawab yang dilakukan manajemen terhadap konsumen. Kasus tersebut tentu menjadi pukulan hebat bagi pemerintah Indonesia yang melaksanakan implementasi *good corporate governance* terhadap perusahaan yang ada di Indonesia. Dampak dari kasus tersebut mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat atau stakeholder pada perusahaan atau institusi pendukungnya (Malau, 2018).

Salah satu cara untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia adalah dengan cara melakukan penerapan *corporate governance*. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *corporate governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Tata Kelola

perusahaan muncul dari kepentingan perusahaan untuk memastikan principal atau investor agar dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien (Mahrani, 2018). Untuk itu penerapan *corporate governance* di Indonesia sangat penting karena, prinsip *corporate governance* dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global. Effendi (2016), mengemukakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Keberadaan *corporate governance* yang kuat merupakan kunci utama dalam pengembangan perusahaan menjadi institusi kinerja yang kuat. Salah satu tolak ukur dalam menilai hasil yang dicapai perusahaan adalah kinerja perusahaan itu sendiri. Menurut pendapat Makatita (2016), kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Pentingnya penilaian kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah mempengaruhi pola pikir pemimpin perusahaan bahwa mengelola perusahaan di masa kini atau masa modern dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menjadi hal yang begitu kompleks. Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan di antara elemen dalam

perusahaan (pemegang saham, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan istutisional) yang berperan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya. Komisaris independen sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* (pedoman umum *good corporate governance* Indonesia bagian IV-c). penelitian yang dilakukan oleh Indriati (2018), menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan karena semakin besar proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik sehingga kinerja keuangan perusahaan juga meningkat. Aprianingsih (2016), Menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris independen yang kurang kompeten dan kurang memiliki sifat kepemimpinan sehingga dewan komisaris independen tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan. Hal ini berarti semakin besar nilai dewan komisaris independen maka kinerja keuangan dalam perusahaan akan menurun.

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya

yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi dianggap berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen perusahaan dan untuk memonitor perusahaan untuk mengoptimalkan operasi laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2020), menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena semakin banyak dewan direksi maka semakin banyak yang menghubungkan dengan pihak eksternal dan pemeran dalam pengelolaan sumber daya dan penentuan strategi-strategi jangka pendek maupun jangka panjang yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Wehdawati (2015), menemukan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena jumlah anggota dewan direksi yang lebih sedikit, maka keputusan yang diambil oleh direksi tidaklah terfokus yang membuat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. selain itu juga tugas komite audit yaitu bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas proses perusahaan dalam memproduksi data keuangan dan control internal, eksistensi komite audit terletak pada peningkatan kualitas laporan keuangannya karena semakin meningkat kualitas

laporan keuangan suatu perusahaan maka akan meningkat juga kinerja keuangan perusahaan tersebut, karena fungsi peran komite audit selain dapat dipercaya mempengaruhi kinerja keuangan juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Indriati (2018), menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Putri (2016), menemukan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, karena semakin besar nilai komite audit maka akan semakin menurunkan kinerja keuangan.

Kepemilikan manajerial sangat penting bagi perusahaan karena manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham di perusahaannya, dan manajer akan berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya sehingga ia pun akan menikmati sebagian keuntungan dari bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham yang di miliki oleh manajerial, maka pihak manajerial akan lebih proaktif dalam bekerja mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian kinerja keuangan perusahaan juga akan naik. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020), menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pangaribuan (2017), menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena kepemilikan manajerial terlalu rendah sehingga kinerja manajer dalam mengelola perusahaan kurang optimal.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan

saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Burhanuddin, 2022). Kepemilikan institusional juga dapat mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* dengan baik dan efektif. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Penelitian yang dilakukan oleh Monica (2019), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Fadilah (2017), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, karena kepemilikan institusional belum mampu melakukan pengawasan yang mendorong manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari kinerja keuangannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dalam kegiatan investasi yang umum digunakan oleh para investor adalah rasio profitabilitas. Daya tarik utama bagi pemegang saham terletak pada rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil pengelolaan manajemen perusahaan atas dana yang diinvestasikan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham. *ROE (return on equity)* adalah salah satu dari rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan dengan memanfaatkan ekuitas menggunakan total laba bersih yang ada dalam suatu perusahaan.

Dari penelitian sebelumnya, terjadi ketidakkonsistenan. Hal ini membuat peneliti termotivasi untuk menguji kembali peran *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan apakah setiap variable berpengaruh positif atau negatif. Variable independen yang digunakan adalah dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Sedangkan variable dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan *return on equity* (ROE). Sampel dari perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan *property* dan *real estate* memiliki prospek yang cerah dimasa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar, semakin banyaknya pembangunan di sector perumahan, apartemen, pusat-pusat perbelanjaan, dan Gedung-gedung perkantoran yang membuat investor tertarik untuk menginvestasikan dananya sehingga prospek perdagangan saham diperkirakan akan terus meningkat. Peneliti juga ingin menguji tata kelola perusahaan (*corporate governance*) *property* dan *real estate* yang baik berdasarkan dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional sehingga dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate*. Peneliti menggunakan ROE yang merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan berapa persen perolehan laba bersih bila diukur dari total modal, artinya ROE digunakan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan investor.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini mengambil judul : **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021”**.



1.2 Perumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut :

- 1.) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate*?
- 2.) Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate*?
- 3.) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate*?
- 4.) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan *property* dan *real estate*?
- 5.) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan *property* dan *real estate*?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate*
- 2.) Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate*
- 3.) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate*
- 4.) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan *property* dan *real estate*
- 5.) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan *property* dan *real estate*

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

1.) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di pelajari dibangku perkuliahan.

2.) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran terhadap kekurangan yang terdapat pada perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi terutama terhadap kinerja perusahaan.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jensen dan meckling (1976), adalah suatu kontrak dibawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agent. Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Tujuan utama dari teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisasi biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. *Agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai lingkungan kerja, perusahaan secara keseluruhan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan inilah yang disebut dengan asimetri informasi. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan antara *principal* dan

agent. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajer terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya moral hazard yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika tidak layak untuk dilakukan. Kepemilikan saham oleh pihak investor dipandang sebagai mekanisme *control* yang memberi pengaruh positif pada kinerja perusahaan.

Good corporate governance merupakan konsep dari teori keagenan, yang berfungsi untuk *agent* dan *principal* agar mentaati peraturan yang sudah disepakati dan sebagai alat yang memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan demikian, adanya penerapan *good corporate governance* ini di harapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan.

2.1.2 Good Corporate Governance

a. pengertian Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Sulistyowati,2017). Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambahan bagi semua pihak yang berkepentingan. *Corporate governance* merupakan struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang di rancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.

b. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* (Manossoh, 2016:23).

1) Transparansi (*transparency*)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kemudian ditegaskan bahwa informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh

anggota direksi dan anggota dewan komisaris peserta anggota keluarganya dalam perusahaan.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar *penerapan good corporate governance* mengandung makna bahwa perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

3) Responsibilitas (*responsibility*)

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Juga, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara lain peduli terhadap

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) Independensi (*indepedency*)

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus di kelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.

5) Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

c. Manfaat *Good Corporate Governance* diantaranya yaitu:

- 1.) Meminimalkan *agency cost* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara principal dengan agen.
- 2.) Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
- 3.) Meningkatkan citra perusahaan.
- 4.) Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah.
- 5.) Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

d. Organ *Good Corporate Governance*

1. Dewan Komisaris independen

Dewan komisaris independen memiliki peranan penting dalam memonitor perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menetapkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan

perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk didalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut).

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak untuk kepentingan perseroan. Anggota dewan komisaris diharapkan memiliki watak yang amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang di perlukan untuk menjalankan tugasnya. Peningkatan jumlah dewan komisaris independent juga memiliki manfaat untuk menengahi suatu masalah dengan menyediakan masukan atau nasihat netral dalam hal terjadi konflik antara anggota organisasi dengan principal dan agen (Wahyuni,2021).

2. Dewan Direksi

Menurut pasal 1 dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dimaksud dengan dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan.

Dewan direksi mempunyai tugas untuk memastikan kebijakan-kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dewan direksi (*board of director*) berfungsi untuk mengurus perusahaan. Jajaran direksi harus mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menerapkan semua ketentuan diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Azmy,2019).

Anggota dewan direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kemampuan dan integritas yang harus dimiliki oleh seorang dewan direksi sebagai berikut :

- 1) Anggota direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lainnya.
- 2) Anggota direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Anggota direksi harus memahami dan melaksanakan pedoman *Good Corporate Governance* ini.

3. Komite Audit

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya

perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh komite nasional *good corporate governance* (KNGCG) pada 30 mei 2002, antara lain disebutkan bahwa :

- Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah :
 - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit :
 - b. Harus ada ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit;
 - c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan *control internal*;
 - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas:
 - 1) Paling sedikit tiga anggota; dan
 - 2) Mayoritas harus independen.

➤ Tujuan dibentuknya komite audit adalah:

a. Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b. Manajemen risiko dan *control*

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan *control*, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan *control*.

c. Tata kelola perusahaan

Tata Kelola perusahaan pada awalnya dikembangkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham tetapi secara bertahap telah menjadi penting bagi pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat. Tata Kelola perusahaan mengidentifikasikan peran direktur dan auditor terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Hakimah, 2019). Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

- Tanggung jawab komite audit dibidang tata kelola perusahaan adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan control yang efektif terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga:
- a. Mengawasi proses tata kelola perusahaan;
 - b. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan;
 - c. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada kode of conduct;
 - d. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan;
 - e. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku;
 - f. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

2.1.3 Struktur Kepemilikan

a. Pengertian Struktur Kepemilikan

Menurut Yuniati (2016), Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor, atau dengan kata lain, struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Yopie (2021), mengemukakan bahwa “struktur kepemilikan merupakan gambaran akan praktik *Good Corporate Governance* yang akan mendorong timbulnya kesadaran perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain termasuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya”. Struktur kepemilikan adalah representasi praktik tata Kelola perusahaan yang baik yang akan mendorong munculnya kesadaran perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang, dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar (Janita,2019).

b. Macam-macam Struktur Kepemilikan

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan

keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2018:2). Menurut Aprianingsih (2016:39), mengemukakan bahwa “kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persen (%)”.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Menurut Pasaribu (2016:156), kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai rasio atas jumlah saham yang dimiliki oleh pengelola dan totalnya modal yang dikelola oleh perusahaan (Anik,2021). Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan,

maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerja untuk kepentingan pemegang saham dan untuk diri sendiri (Simarmata,2018).

2. Kepemilikan Institusional

Menurut Azhari (2019), mengemukakan bahwa “kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dapat berupa saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain”. Menurut Aprianingsih (2016:66), mengemukakan bahwa “kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh orang di luar perusahaan terhadap total saham perusahaan”. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5 %) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Harnida, 2015). Kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan

berperan penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham serta mampu memantau manajemen dalam mengelola perusahaan (Leksono, 2018). Kepemilikan Institusional yang terdiri dari perusahaan asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan lainnya memiliki kekuatan untuk menerapkan pengaruh yang cukup besar pada operasi perusahaan”. Menurut Ulya (2018), Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015:46).

Manfaat penelitian kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut :

- a.) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b.) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c.) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d.) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e.) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Laporan Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.1 (revisi 2009:01-5) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan dalam suatu periode. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan, dengan melihat sebagai persoalan yang ada, baik itu kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu atau periode tertentu.

Berikut adalah rasio keuangan menurut Hanafi dan Halim (2018:77), sebagai berikut:

- a.) Rasio likuiditas, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek.
- b.) Rasio aktivitas, merupakan rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset.
- c.) Rasio solvabilitas, merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
- d.) Rasio profitabilitas, merupakan rasio yang memiliki kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang terdiri dari : *profil margin, operating profit margin, return on asset, return on investment*, dan *return on equity, gross profit margin, net profit margin*.
- e.) Rasio pasar, rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang di ungkapkan dalam basis persaham.

2.2 Penelitian Terdahulu

Indriati (2018), melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur sektor *Food and beverage* yang Listing di BEI pada Tahun 2014-2017). Variabel independennya adalah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. analisis yang digunakan adalah analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kinerja keuangan.

Situmorang (2019), melakukan penelitian tentang *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Variabel independennya adalah persentase kepemilikan institusional, Komposisi dewan direksi, Komposisi komisaris independen. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan (ROE). analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Persentase kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Komposisi dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Komposisi komisaris independen secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hanifah (2021), melakukan penelitian tentang *Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sub-Sektor Property dan Real Estate Periode 2017-2019*. Variabel independennya adalah Ukuran Dewan Komisaris. Komisaris Independen. Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan Institusional. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan Uji Asumsi Klasik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen,

Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Fharaswati (2021), melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor *Propety* Dan *Real Estate* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Variabel independennya adalah kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi dewan komisaris independen, Komite Audit. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Tidak Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Sulisyowati (2017), melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. Variabel independennya adalah dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Wehdawati (2015), melakukan penelitian tentang Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Manufaktur yang terdaftar Di BEI Tahun 2012.

Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling maka diperoleh sampel penelitian yang berjumlah 91. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan variabel jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE.

Widyastuti (2017), melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Variabel independennya adalah dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, komisaris independen. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Analisis yang digunakan untuk penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. komite audit berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan. dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Novitasari (2019), melakukan penelitian tentang Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Variabel Independennya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit. Variabel dependennya

adalah kinerja keuangan. Analisis yang digunakan untuk penelitiannya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dewan direksi dan dewan komisaris juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Putri (2016), melakukan penelitian tentang *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*. *Good corporate governance* di proksikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. komite audit berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Rulintiawati (2020), melakukan penelitian tentang *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018)*. Variabel independennya adalah komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. analisis yang digunakan adalah

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. dewan komisari berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Fadilah (2017), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan. variabel independennya adalah dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini ingin melanjutkan penelitian dari Rulintiawati (2020), dalam penelitian ini banyak terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi juga ada beberapa perbedaan. berikut ini beberapa persamaan :

Persamaannya yaitu, Sama-sama mengacu pada kinerja keuangan pada perusahaan, Sama-sama meneliti tentang *pengaruh good corporate governance*, Sama-sama menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni, Pada penelitian ini menambahkan satu variabel independennya yaitu struktur kepemilikan, Periode pengukuran laporan keuangan yang dijadikan

sampel berbeda dengan penelitian terdahulu, lokasi penelitian juga berbeda dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan sektor *property* dan *real estate*.

